

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang meliputi analisis terhadap peranan audit operasional dalam menunjang efektivitas fungsi personalia pada PT Pos Indonesia (Persero), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi personalia pada PT Pos Indonesia (Persero) telah dilaksanakan dengan efektif dan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, hal ini dapat diketahui dari:
  - a. Pengadaan tenaga kerja pada PT Pos Indonesia (Persero), dimulai dengan adanya perencanaan, perekrutan dengan memasang iklan, atau meminta bantuan Depnaker. Penerimaan pegawai dilakukan melalui seleksi yang terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi saringan masuk berupa tes. Setelah dinyatakan lulus, calon pegawai akan ditempatkan pada bagian yang membutuhkan dengan menjalani masa percobaan.
  - b. Dalam usaha mengembangkan tenaga kerja, PT Pos Indonesia (Persero) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan.
  - c. Dalam hal kompensasi, karyawan menerima gaji setiap bulannya, serta bagi pegawai yang memegang jabatan diberikan tunjangan jabatan setiap bulannya.
  - d. Dalam hal integrasi tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan cukup baik yaitu adanya kerja sama yang produktif dan kreatif untuk mencapai sasaran bersama dan selalu melakukan koordinasi yang lebih baik antar bagian.
  - e. Perihal pemeliharaan tenaga kerja PT Pos Indonesia (Persero) para pegawai diberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang berupa penggantian biaya dokter dan biaya pengobatan. Hal tersebut dilakukan perusahaan sebagai upaya dalam memelihara kondisi pegawai agar dapat bekerja dengan baik. Selain itu PT Pos Indonesia (Persero) memiliki program

pelayanan kesejahteraan pegawai seperti tempat beribadah (mushola), koperasi perusahaan, program bea siswa bagi putra-putri pegawai, tunjangan rumah, dan lain sebagainya.

- f. Pemberhentian pegawai pada PT Pos Indonesia (Persero), selalu ditandai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan seperti pemberhentian atas permintaan sendiri, mencapai batas masa pensiun, penyederhanaan organisasi, pegawai tidak cakap, pegawai tersebut melakukan pelanggaran disiplin, pegawai tersebut melakukan pelanggaran pidana, dan akibat meninggal dunia.
2. Audit operasional yang dilakukan pada PT Pos Indonesia terhadap fungsi personalia cukup berperan, hal ini dapat diketahui dari:
    - a. Audit terhadap fungsi personalia dilakukan secara rutin setiap satu bulan.
    - b. Secara keseluruhan auditor telah berperan dalam melakukan pelaksanaan audit operasional terhadap fungsi personalia, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hal-hal berikut ini:
      - Adanya audit terhadap fungsi personalia yang telah ditetapkan perusahaan, dan memeriksa apakah seluruh kegiatan personalia telah mengikuti ketentuan yang ada.
      - Adanya audit terhadap kelengkapan dokumen dan catatan mengenai kepegawaian. Misalnya daftar hadir, jumlah pegawai.
      - Adanya audit terhadap pelaksanaan pegawai yang menyangkut kegiatan pegawai. Audit operasional ini dilakukan dengan cara memeriksa apakah pegawai tersebut melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
      - Adanya audit apakah fungsi personalia telah dijalankan oleh bagian yang berwenang. Fungsi-fungsi personalia tersebut meliputi bagian penerimaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, pemutusan tenaga kerja, kompensasi tenaga kerja, dan lain sebagainya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi PT Pos Indonesia (Persero) khususnya di bidang audit dan di bidang personalia yaitu sebagai berikut:

- Sebaiknya pencatatan waktu kerja menggunakan *clock card* sehingga dapat mengurangi kesalahan dan penyimpangan.
- Sebaiknya *job description* ditetapkan dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi sehingga kerja sama antara pegawai dapat ditingkatkan.
- Sebaiknya *job description* memuat pemisahan fungsi divisi secara jelas dan tegas.
- Sebaiknya ada kebijakan SDM untuk staf audit yang independent.